

**ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI
DESA JAMBU REJO KECAMATAN SUMBER HARTA
KABUPATEN MUSI RAWAS**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**



Disusun Oleh :

FITRIA NURBAITI

NIM. 07011281823077

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

**“ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA JAMBU REJO
KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS”**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1
Administrasi Publik**

Oleh :

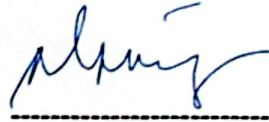
FITRIA NURBAITI

07011281823077

Pembimbing I

1. Dr, Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 19780818 200912 1 002

Tanda Tangan

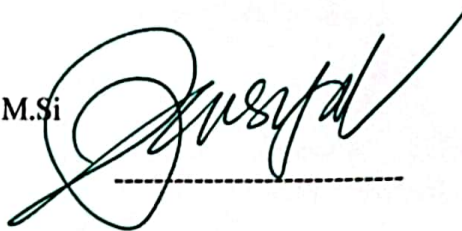


Tanggal

09-10-2023

Pembimbing II

2. Januar Eko Aryansah, S.IP. SH. M.Si
NIP. 19880127 201903 1 005



25-10-2023

Mengetahui,

Ketua Jurusan Administrasi Publik,



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001



HALAMAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

**“ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DI DESA JAMBU REJO
KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS”**

Skripsi

Oleh :

FITRIA NURBAITI

07011281823077

**Telah dipertahankan di depan penguji
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat
Pada tanggal 24 November 2023**

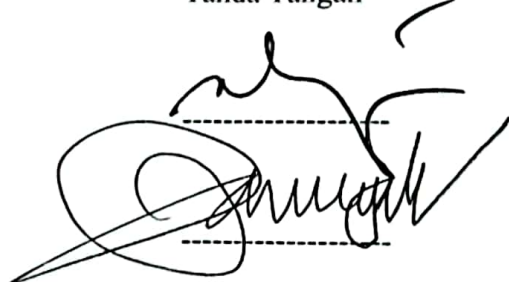
Pembimbing :

1. Dr, Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 19780818 200912 1 002
2. Januar Eko Aryansah, S.IP. SH. M.Si
NIP. 19880127 201903 1 005

Penguji :

1. Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001
2. Dr. Sena Putra Prabujaya, S.AP., M.AP
NIP. 19870105 201504 1 003

Tanda Tangan



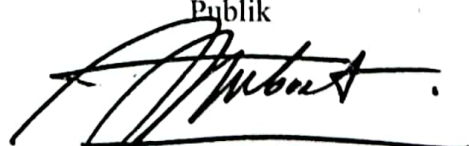
Tanda Tangan



Mengetahui,



Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Publik



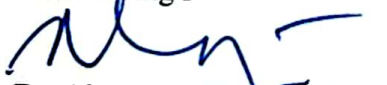
Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

ABSTRAK

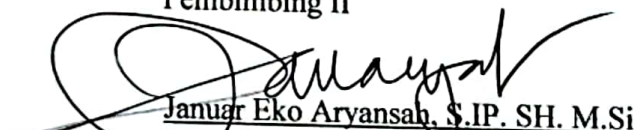
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa jauh APBDes di Desa Jambu Rejo tahun 2020-2022 sudah memenuhi prinsip anggaran responsif gender. Fokus penelitian adalah analisis anggaran responsif gender pada anggaran pendapatan dan belanja desa di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, yang meliputi aspek spesifik gender, kesetaraan gender, dan mainstream gender. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu dokumen anggaran dan informan. Dokumen anggaran yang digunakan dalam menganalisis anggaran responsif gender pada anggaran pendapatan dan belanja desa jambu rejo kecamatan sumber harta kabupaten musu rawas. sumber data yang dimaksud adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), sedangkan data dari informan digunakan untuk mengetahui kendala dalam penerapan anggaran responsif gender dalam anggaran pendapatan dan belanja desa jambu rejo. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan analisis data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa Anggaran responsif gender pada APBDes desa Jambu Rejo tahun 2020-2022 untuk 1) Untuk spesifik gender telah dilakukan program tentang kesehatan perempuan dan laki-laki, program penambahan Gizi dan makanan untuk balita dan ibu-ibu yang sedang menyusui dan program untuk kebutuhan lansia. 2) Untuk kesetaraan gender, desa Jambu Rejo telah melakukan program pelatihan menjahit untuk wanita agar para wanita bisa memiliki keterampilan dan mampu sejajar dengan para laki laki dalam menghasilkan keuangan di keluarga mereka. 3) Untuk mainstream gender, belum tampak di APBDes desa Jambu Rejo. Namun itu tampak pada saat penyusunan APBDes desa Jambu Rejo.

Kata Kunci : prinsip anggaran responsif gender, APBDes di Desa Jambu

Pembimbing I

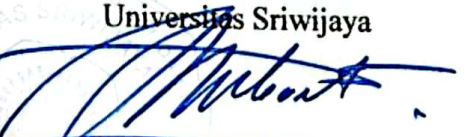

Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si
NIP. 19780818 200912 1 002

Pembimbing II


Januar Eko Aryansah, S.IP. SH. M.Si
NIP. 19880127 201903 1 005

Indralaya, November 2023

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya

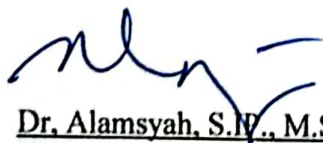

Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP. 19691110 199401 1 001

ABSTRACT

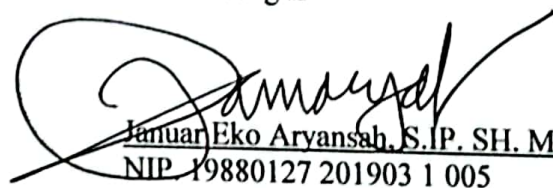
This study aims to analyze how far the APBDes in Jambu Rejo Village in 2020-2022 has met the principles of gender responsive budgeting. The focus of the research is an analysis of gender-responsive budgeting in the village revenue and expenditure budget in Jambu Rejo Village, Sumber Harta Subdistrict, Musi Rawas Regency, which includes aspects of gender specificity, gender equality, and gender mainstreaming. The type of research used in this research is qualitative research. This research uses two types of data sources, namely budget documents and informants. Budget documents used in analyzing gender responsive budgets in the revenue and expenditure budget of the village of Jambu Rejo, Sumber Harta sub-district, Musi Rawas Regency. the data source in question is the Government Agency Performance Accountability Report (LAKIP) of Jambu Rejo Village, Sumber Harta Sub-district, Musi Rawas Regency, Budget Implementation Document (DPA), Work Plan and Budget (RKA), while data from informants is used to find out the obstacles in implementing gender responsive budgets in the revenue and expenditure budget of the village of Jambu Rejo. The data collection techniques used are documentation and interviews. Data analysis techniques used by researchers are data reduction, data presentation and conclusion drawing. Based on data analysis and discussion, it can be concluded that the gender responsive budget in the APBDes of Jambu Rejo village in 2020-2022 for 1) For specific gender, programs have been carried out on women's and men's health, nutritional and food addition programs for toddlers and mothers who are breastfeeding and programs for the needs of the elderly. 2) For gender equality, Jambu Rejo village has conducted a sewing training program for women so that women can have skills and be able to be equal to men in generating finances in their families. 3) For mainstream gender, it is not yet visible in the APBDes of Jambu Rejo village. However, it appears during the preparation of the APBDes of Jambu Rejo village.

Keywords: gender responsive budget principles, APBDes in Jambu Village

Pembimbing I


Dr. Alamsyah, S.P., M.Si
NIP. 19780818 200912 1 002

Pembimbing II


Januar Eko Aryansah, S.IP. SH. M.Si
NIP. 19880127 201903 1 005

Indralaya, November 2023
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



Dr. M. Nur Budiyanto, S.Sos., MPA
NIP: 19691110 199401 1 001

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fitria Nurbaiti
NIM : 07011281823077
Tempat dan Tanggal Lahir : Tugumulyo, 30 Desember 2000
Program Studi/Jurusan : Administrasi Publik
Judul Skripsi : Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan serta pemikiran saya dengan pengarahan dari pembimbing yang ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila di kemudian hari ditemukan bukti ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Indralaya, 03 November 2023

Yang membuat pernyataan,



Fitria Nurbaiti

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas”. Skripsi ini dibuat sebagai salah satu syarat kelengkapan dalam menyelesaikan tugas akhir di Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini juga banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan arahan dari berbagai pihak sehingga pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Keluargaku terkasih, Ayahanda Basuki, Ibunda Siti Rukayah, Adinda Wiwik Catur Subakti, Adinda Kiti Nurhayati, dan Adinda Qurotul Aini, terimakasih untuk semua doa dan dukungannya, terimakasih untuk semua pengorbanan serta kasih sayangnya, dan terimakasih telah menjadi tempat yang hangat untuk bersandar dan pulang.
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, SE. M.Si selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Prof. Dr. Alfitri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Bapak Dr. Muhammad Nur Budiyanto, S.Sos., MPA selaku Ketua Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
5. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan solusi dan saran selama masa perkuliahan.
6. Bapak Dr. Alamsyah, S.IP., M.Si selaku Pembimbing pertama dan Bapak Januar Eko Aryansah, S.IP., M.Si selaku Pembimbing kedua yang selalu memberikan arahan, ilmu pengetahuan serta masukan dan saran yang membangun dalam proses pengerjaan skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah memberikan ilmu, pengetahuan, didikan, bimbingan dan arahan.
8. Seluruh pegawai dan staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya yang telah membantu dalam proses administrasi akademik.
9. Bapak Maryadi, S,IP selaku Kepala Desa Jambu Rejo, Bapak Rujito, S.Pd.I selaku Sekretaris Desa Jambu Rejo, Bapak Joni Chandra, S.Sos selaku Kasi Penggerak Swadaya Masyarakat Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Musi Rawas, Bapak Irfan Fauzi, ST selaku Kasi Fasilitas Perencanaan dan Evaluasi Keuangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Musi Rawas, Ibu Siwi selaku pendamping desa jambu rejo, dan Ibu Eka Ria Zulhiza selaku BPD Desa Jambu rejo, yang telah bersedia menjadi Narasumber dalam penelitian ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhirnya dengan baik.
10. Sahabat seperjuanganku Natasha Yonolda Zunisya yang telah menemani dan memberikan semangat kepada saya dari awal perkuliahan sampai terselesaikannya tugas akhir saya.
11. Teman-teman Administrasi Publik angkatan 2018

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia, limpahan rahmat dan hidayah-nya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan yang disebabkan oleh keterbatasan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis menerima kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan skripsi ini. Penulis juga berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca dalam menambah wawasan dan pengetahuan kita bersama.

Indralaya, 24 November 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Fitria Nurbaiti', enclosed within a faint rectangular border.

Fitria Nurbaiti

DAFTAR ISI

| | |
|----------------------------------|------|
| ABSTRAK | i |
| ABSTRACT | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| DAFTAR TABEL | viii |
| DAFTAR GAMBAR | ix |
| DAFTAR LAMPIRAN | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xi |
| BAB 1 | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2 Rumusan Masalah..... | 9 |
| 1.3 Tujuan Penelitian | 9 |
| 1.4 Manfaat Penelitian | 9 |
| BAB 2 | 11 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 11 |
| 2.1 Landasan Teori | 11 |
| 2.2 Konsep Anggaran Publik | 11 |
| 2.3 Konsep Gender | 12 |

| | |
|---|----|
| 2.4 Konsep Responsif Gender | 13 |
| 2.5 Konsep Anggaran Responsif Gender | 14 |
| 2.6 Konsep Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa | 15 |
| 2.7 Teori Penelitian | 16 |
| 2.8 Penelitian Terdahulu | 18 |
| 2.9 Kerangka Pemikiran | 25 |
| BAB 3 | 26 |
| METODOLOGI PENELITIAN | 26 |
| 3.1 Jenis Penelitian | 26 |
| 3.2 Definisi Konsep | 26 |
| 3.3 Fokus Penelitian | 27 |
| 3.4 Jenis dan Sumber Data | 28 |
| 3.5 Informan Penelitian | 29 |
| 3.6 Teknik Pengumpulan Data | 30 |
| 3.7 Teknik Analisis Data | 31 |
| 3.8 Teknik Keabsahan Data | 32 |
| BAB 4 | 33 |
| PEMBAHASAN | 33 |
| 4.1 Gambaran Umum Desa Jambu Rejo | 33 |
| 4.2 Hasil Penelitian | 35 |
| 4.2.1 Proses Perencanaan Pembangunan di Desa Jambu Rejo | 35 |

| | | |
|----------------|---|----|
| 4.2.2 | Proses Penyusunan Anggaran di Desa Jambu Rejo..... | 35 |
| 4.2.3 | Analisis APBDes Jambu Rejo dengan Anggaran Responsif Gender | |
| | 37 | |
| 4.3 | Pembahasan..... | 58 |
| BAB 5 | | 64 |
| PENUTUP | | 64 |
| 5.1 | Kesimpulan..... | 64 |
| 5.2 | Saran | 65 |
| DAFTAR PUSTAKA | | 66 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 2.0.1 Penelitian Terdahulu..... | 19 |
| Tabel 3.0.1 Fokus Penelitian | 28 |
| Tabel 0.1 Narasumber Wawancara..... | 37 |
| Tabel 0.2 Program Pembedayaan Masyarakat melalui dana APBDes Tahun 2020 | 50 |
| Tabel 0.3 Program Pembedayaan Masyarakat melalui dana APBDes Tahun 2021 | 51 |
| Tabel 0.4 Program Pembedayaan Masyarakat melalui dana APBDes Tahun 2022 | 52 |

DAFTAR GAMBAR

| | |
|-------------------------------------|----|
| Gambar 0.1 Kerangka Pemikiran | 25 |
|-------------------------------------|----|

DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---|----|
| Lampiran 1 Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Skripsi..... | 68 |
| Lampiran 3 Surat Izin Penelitian ke Kantor Desa Jambu Rejo | 69 |
| Lampiran 4 Surat Izin Penelitian ke Dinas PMD Kabupaten Musi Rawas | 70 |
| Lampiran 5 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I | 71 |
| Lampiran 6 Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II | 73 |
| Lampiran 7 Lembar Revisi Seminar Proposal | 74 |
| Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I..... | 76 |
| Lampiran 9 Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II..... | 77 |
| Lampiran 10 Pedoman Wawancara | 78 |
| Lampiran 11 Foto Penelitian | 81 |
| Lampiran 12 Instruksi Presiden Republik Indonesia (INPRES) Nomor 9 Tahun 2000 (9/2000) | 82 |
| Lampiran 13 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 | 83 |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|---|
| SDGs | : Sustainable Development Goals |
| MDGs | : Millenium Development Goals |
| Inpres | : Instruksi Presiden |
| APBDes | : Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa |
| PUG | : Pengarusutamaan Gender |
| PPRG | : Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender |
| KDRT | : Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| HIV | : Human Immunodeficiency Virus |
| AIDS | : Acquired Immunodeficiency Syndrome |
| LSM | : Lembaga Swadaya Masyarakat |
| RKA | : Rencana Kerja dan Anggaran |
| SKPD | : Satuan Kerja Perangkat Daerah |
| ARG | : Anggaran Responsif Gender |
| RPJMDesa | : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa |
| RPJPDesa | : Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa |
| RENSTRA | : Rencana Strategis |
| RENJA | : Rencana Kerja |
| DPA | : Dokumen Pelaksanaan Anggaran |

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu keberlanjutan Millenium Development Goals (MDGs) dengan target pencapaian di 2030 dengan berorientasi pada hasil dan ukuran kuantitatif serta juga pada mutu. SDGs merupakan berprinsip dalam pemenuhan keperluan saat ini, dengan general kedepan. Dengan kata lain, pembangunan berlanjutan merupakan yang dilakukan untuk pemenuhan keperluan dan pengurangan daya mampu generasi kedepan, untuk pemenuhan keperluan mereka.

Pembangunan berkelanjutan mempunyai tiga pilar terintegrasi, ekonomi, sosial serta lingkungan. Dalam tujuan pembangunan berkelanjutan terdapat 17 pilar, yaitu : 1) tidak adanya kemiskinan wujud apapun, 2) tak ada yang kelaparan, 3) mencapai ketahanannya, mendorong pertanian yang berlanjutan dan menjamin baik untuk seluruh masyarakat, 4) Pendidikan dengan pemerataan dan mutu, 5) setaranya gender, 6) air bersih serta sanitasi, 7) energi bersih serta jangkauan, 8) pertumbuhannya dengan ekonomi berkelanjutan, 9) industry serta dukungan, 10) pengurangan kesenjangan, 11) kota serta komunitasnya 12) konsumsi serta produksi dengan tanggung, 13) aksi terhadap iklimnya, 14) pelestarian dengan penjagaan kehidupan sumber daya laut, 15) perlindungan pengembalian serta peningkatan berlangsungnya ekosistem didarat, 16) peradilan yang kuat serta damai, 17) mitra capaian tujuannya (Ferawati, 2018).

17 tujuan pembangunan serta berlanjut, proposal ini disesuaikan dengan SDGs nomor 5 dengan setara gender. Yang mana kesetaraan gender ini digunakan dalam penerapan merencanakan serta mengangarkan, merespon pada anggaran perbelanjaan.

Pada hal ini, kondisi senantiasa dengan tuntutan untuk merubah yang besar dan terkait dengan relasi gender, korelasi sosial dengan perempuan dan laki-laki dengan mutu, skill, peran serta fungsi konvensinya dengan perkembangan. Kata lainnya saat ini, kesetaraan gender menjadikannya hal yang krusial. Perwujudan kesetaraan tersebut, menjadi harapan perempuan juga laki laki dalam kontribusi rangka pembangunan dengan berkeadilan (Akbar, 2018). Dikarenakan bisa dikatakan jika isu gender ini memperlihatkan dominasi laki laki atas perempuan, dengan memperlihatkan dominasi pemerintah, dengan turun tangan pada kesetaraan gender. Pengeluaran aturan dengan PUG, contoh pada instruksi presiden, pelaksanaan PUG dengan program serta kegiatan yang ada. Inpres ini sudah menjadi fase mula berkembangnya gender Indonesia.

Pembangunan dengan kemajuan, keadilan bagi warga negara. Realitanya, penuh dirasakan dan pemenuhan harapan keperluan dan utama sekali bagi perempuan ataupun perkelompok yang kurang mampu. Kenyataan itu, menjadi dorongan pergerakan, hasil dari membangun keadilan dari kaum dengan dua alasannya, jumlah kaumnya, dibandingkan dengan jumlah laki-laki, keduanya menjadi kontribusi hasil membangun secara menyeluruh.

Indonesia secara konstitusional, menjamin kemakmuran secara umum, hak kaum perempuan dengan tanggung jawab pemerintah. Penghapusan diskriminasi

secara umum. Hakikatnya pelanggaran HAM menghapus diskriminasi bagian dengan praktek baik oleh masyarakatnya, dengan perempuan ataupun laki-laki dari penderitaannya (Astuti, 2016). Fakta mengenai kerentanan perempuan menjadi korban dengan 67 % jam pekerjaan dunia, dengan tiga orang yang butu hurut, perempuan dan upah kerja rendah dengan kisaran dari 50 %-85 % dengan perolehan dari laki-laki, dan perempuan. Dikarenakan hal tersebut, wajar diskriminasi dengan mengingat apa yang diperjuangkan dari hak-hak yang ada, untuk bebas dari diskriminasi dan penerbitan dari Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Praktek banyak negara, utama sekali pada negara yang berkembang, pembangunan di Indonesia juga dengan optimalisasi melibatkan kaum perempuan. Hal tersebut dikarenakan hasil pembangunan menjadi bias gender ataupun tidak sensitif, dengan keperluan perempuan ataupun perolehan yang harus dirasakan oleh perempuan (Astuti, 2016). Warga negara juga dijamin perolehan kemakmuran dan kesejahterannya. Kaum perempuan butuh dengan jelas yang semestinya dalam berkehidupan. Pihak-pihak itu dengan anggaran yang masuk akal, dengan proses yang mungkin menjadi partisipasi dan kontrol, serta kemanfaatan kegiatan keluarga, masyarakat dan negara.

Tak sedikit kajian memperlihatkan jika sekarang ini banyak aturan dan program di Indonesia, belum sensitif dengan muara tidak adanya keadilan gender dalam pelayanan publik. Ketidakadilan ini dirasakan, dengan pembuktian porsi yang ditujukan dengan media publik dan utama sekali pada kesehatan air bersih yang juga memadainya (Astuti, 2016). Senjangnya gender dalam memenuhi pelayanan

dasar bidang pendidikan, kesehatan, keamanan dan kemakmuran masih menjadi permasalahan. Bidang pendidikan contohnya, perempuan dan juga anak perempuan, kenyataan kuat yang dirasakan dengan pengelompokan dari bidang yang anemia, paling banyak berkorban dengan kenyataan perolehan komitmen untuk perolehan sejahterannya Konferensi Beijing 1995.

Beberapa kajian mengenai Anggaran Responsif gender memperlihatkan jika daerah di Indonesia belum dengan alokasi anggaran, dimensi dan hasil kebijakan program dan penunjukan ketimpangan gender. Hal yang menarik, belum ada alokasi anggaran dimensi dari kebijakan dan makna anggaran dan respon yang ada.

Peraturan perundang-undangan turunannya di Indonesia yang mengatur tentang implementasi pengarusutamaan gender sebagai strategi mewujudkan kesetaraan gender diantaranya adalah Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional. Inpres ini memastikan bahwa seluruh proses pembangunan nasional, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring dan evaluasinya harus mengintegrasikan gender. Konsideran menimbang dalam Inpres No. 9 Tahun 2000 menyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran dan kualitas perempuan serta upaya mewujudkan pengarusutamaan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan pemerintah daerah dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional.

Implementasi Inpres nomor 9 tahun 2000 ditandai dengan masuknya isu kesetaraan gender dalam visi pembangunan nasional jangka panjang 2005-2025,

untuk mewujudkan Indonesia yang mandiri, maju, adil dan makmur. Adil berarti tidak ada pembatasan gender. Penghapusan diskriminasi gender di semua bidang kemudian menjadi isu yang terus menerus dibahas sebagai target pembangunan. Sejak beberapa dekade terakhir kebutuhan analisis dan integrasi gender dalam proyek-proyek pembangunan mulai muncul di berbagai bidang. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh kesenjangan yang ada di antara laki laki dan perempuan baik dalam hal akses, kontrol dan partisipasi terhadap sumber daya, pengambilan keputusan baik diruang publik dan domestik serta penerimaan atas manfaat pembangunan.

Dari kajian dengan yang ada menunjukkan beberapa daerahnya sudah ada alokasi anggaran, meskipun hanya terdapat beberapa ODP (Liufeto & Angi, 2019). Ada juga riset memperlihatkan mengalokasikan anggaran berdimensi gender dikarenakan beberapa kendala yaitu: kendala kebijakan, kendala struktural, dan kendala kultural (Hastuti, 2010). Dari salah satu riset yang dilakukan di Kota Semarang tahun 2010-2013 yang menganalisis alokasi anggaran empat dinas dengan alokasi dan memperlihatkan alokasi dengan tulisan pada regulasi pada pasal 171 ayat 2 (Yaselin & Chusnul, 2021).

Penelitian ini dilatar belakangi oleh research gap pada penelitian penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Oktaria (2015), Astuti (2016), Akbar (2018). Penelitian didukung oleh, Lestari (2014), Darwanis (2015). Mereka memperoleh kesimpulan bahwa wacana gender (gender discourses) memang menarik untuk dibahas dan memberikan tempat tersendiri bagi masyarakat secara luas. Wacana gender seperti isu-isu gender telah menggema dan merebak dimana mempertanyakan kesetaraan laki-laki dan perempuan. Dalam rangka mendukung

akan konsep tersebut maka pemerintah dalam hal ini presiden mengeluarkan peraturan yang terdapat dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional yang mana didalamnya berisi mengenai kewajiban dari berbagai sektor pemerintahan untuk melaksanakan pengarusutamaan gender baik itu dari segi kebijakan maupun programnya.

Selain itu berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Bapak MA selaku Kepala Desa Jambu Rejo dikatakan bahwa Desa Jambu Rejo belum menganggarkan anggaran berdimensi gender.

Kalau untuk pelayanan ada, tapi kalo untuk anggaran itu belum ada karna di poksi tahun 2020-2022 itu gak ada juknisnya (interview, MA, 10/05/2023)

. Namun pada saat melakukan observasi kembali ke lapangan diketahui bahwa telah menganggarkan anggaran berdimensi gender namun hal itu belum 100% terlaksana. Hanya 85% tercapai dari target yang di anggarkan. Hal ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat Desa Jambu Rejo terutama pada akses pendidikan dan kesehatan yang belum maksimal.

Ada permasalahan dengan menerapkan anggaran yang merespon gender di Indonesia, yaitu dengan pandangan tanggung jawab, minimnya keikutsertaan perempuan dalam posisi yang strategis, dengan perspektif dari pemerintahan (Farida, 2019). APBD menunjukan jika alokasi ini dengan penerapan PPRG Kota Makasar, dengan terstruktur dan kultural (Khaerah & Mutiarin, 2016). Anggaran responsif gender pada APBD di kabupaten Temanggung tahun 2016 memperlihatkan jika terlaksananya optimal, dengan data diperoleh keseluruhan dari PPRG serta ARG (Akbar, 2018).

Provinsi Sumatera Selatan, sendiri sudah keberpihakan dan adil yang mana dokumen perencanaan dan penganggaran diperoleh dengan nilai kesetaraan yang ada (Oktaria, 2015). Hal ini memperlihatkan jika terhadap peraturan sudah baik, dan menunjukkan bahwa sudah adanya kesadaran akan pentingnya Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Penelitian ini akan berkontribusi terhadap pengetahuan tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) yang akan menganalisis PPRG pada tingkat atau level desa. Karena dari 10 artikel yang sudah ditelaah belum ada satupun riset atau penelitian yang menelaah tentang PPRG pada tingkat dan level desa.

Berdasarkan observasi awal anggaran responsif gender pada anggaran dana Desa Di Desa Jambu Rejo Kecamatan Sumber Harta Kabupaten Musi Rawas itu terbagi untuk spesifik gender telah dilakukan program tentang kesehatan perempuan dan laki-laki, program penambahan Gizi dan makanan untuk balita dan ibu-ibu yang sedang menyusui dan program untuk kebutuhan lansia. Untuk kesetaraan gender, desa Jambu Rejo telah melakukan program pelatihan menjahit untuk wanita agar para wanita bisa memiliki keterampilan dan mampu sejajar dengan para laki laki dalam menghasilkan keuangan di keluarga mereka. Untuk mainstream gender, sudah terlihat adanya program yang mendukung kesetaraan gender dan mendukung kebutuhan laki-laki dan perempuan

Untuk program tahun 2020-2022 yang benar-benar berdimensi gender yaitu Kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB. Kegiatan pelayanan pendidikan Informasi dan kebudayaan perempuan dan kegiatan pemberdayaan

ekonomi masyarakat desa. Namun program pembedayaan masyarakat melalui dana APBDES pada tahun 2021 menurun menjadi 3 program dengan anggaran sebesar Rp. 115.000.000. Adapun tiga rinciannya sebagai berikut kegiatan pemberdayaan posyandu, UP2K dan BKB sebesar Rp. 80.000.000. Kegiatan pendidikan anak usia dini sebesar Rp. 25.000.000. Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) sebesar Rp. 10.000.000. begitu juga pada tahun 2022 ada penurunan walaupun tidak signifikan mempengaruhi proses yang ada.

Setiap tahun dari tahun 2020, tahun 2021 dan tahun 2023 progress sudah berjalan walaupun tidak mencapai 100% dimana di desa Desa Jambu Rejo. Untuk tahun 2020 anggaran desa untuk dimensi spesifik gender 10% dari anggaran desa pada kegiatan pelayanan pendidikan Informasi dan kebudayaan dan kegiatan pendidikan anak usia dini. Untuk tahun 2021 meningkat menjadi 12% dan meningkat lagi jadi 15% untuk tahun 2022. Sedangkan untuk dimensi kesetaraan gender anggaran untuk tahun 2020 sebesar 15% dengan kegiatan unggulan kegiatan pemberdayaan usaha kecil dan Industri rumah tangga. Selanjutnya tidak ada peningkatan pada tahun 2021 dan 2022 tetap 15%. Untuk dimensi mainstream gender, anggaran yang usulkan sangat kecil yaitu 7% untuk 3 tahun terakhir yaitu tahun 2020, 2021 dan 2023. Dengan kegiatan pengembangan dan pemanfaatan TTG.

Dengan anggran yang telah dianggarkan nyatanya tidak ada ada pelatihan untuk ibu hamil guna meningkatkan keselamatan bagi ibu melahirkan dan anak. Program pelatihan dari pemerintah untuk laki-laki dan perempuan guna menunjang program kesetaraan gender juga tidak ada. Anggaran untuk pembangunan fasilitas umum seperti toilet umum, pojok asi, dan smoking area, lapangan olahraga dan

taman desa pun tidak ada dengan alasan pembangunan untuk lapangan olahraga itu tentunya kita harus punya dana kas desa.

Berdasarkan fenomena dalam latar belakang, maka penulis mengusulkan judul penelitian **“ANALISIS ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA ANGGARAN DANA DESA DI DESA JAMBU REJO KECAMATAN SUMBER HARTA KABUPATEN MUSI RAWAS”**. Dengan adanya usulan penelitian ini diharapkan pemerintah desa jambu rejo dapat mengalokasikan Anggaran Responsif Gender dan membuat kebijakan serta program yang responsif gender pada APBDes tahun-tahun selanjutnya.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Apakah APBDes Desa Jambu Rejo pada tahun 2020-2022 sudah responsif gender?”

1.3 Tujuan Penelitian

Menganalisis seberapa jauh APBDes di Desa Jambu Rejo tahun 2020-2022 sudah memenuhi prinsip anggaran responsif gender.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah:

- a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini agar dapat dijadikan sebagai bahan kajian yang bermanfaat bagi para akademik yang akan mengembangkan penelitian ini lebih lanjut dalam studi-studi administrasi publik.

b. Manfaat Praktis

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi Pemerintah Desa Jambu Rejo mengenai penerapan perencanaan, dan penganggaran responsif gender pada APBDes, supaya pemerintah Desa Jambu Rejo dapat membuat kebijakan dan program yang sesuai dengan Anggaran Responsif Gender dan diharapkan masyarakat baik perempuan maupun laki-laki dapat berperan serta aktif dalam rangka pembangunan daerahnya yaitu Desa Jambu Rejo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. A. (2018). Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2016. *Journal of Politic and Government Studies*, 1–17. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/21626>
- Astuti, P. (2016). *Analisis Anggaran Responsif Gender Pada Apbd Kota Semarang Tahun 2010-2013*. 7(1), 37–52. <https://doi.org/10.14710/politika,7,1,37-52>
- BKkbN. (2009). *Konsep dan Teori Gender*. BKkbN Pusat: Jakarta.
- Creswell, J. W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design, Choosing Among Five Traditions*. Sage Publication: California.
- Darwanis. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender sebagai Percepatan Pencapaian Target MDGs. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 6(3), 481–492. <https://doi.org/10.18202/jamal.2015.12.6038>
- Dewi, P. T. R., Erawan, I. K. P., & Bandiyah. (2019). *Integrasi Anggaran Responsif Gender dalam APBD (Studi pada Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Bali TA 2019)*. 1–10. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1712682>
- Farida, S. I. (2019). Anggaran Responsif Gender Sebagai Suatu Instrumen Negara Untuk Pemenuhan Hak Perempuan Di Indonesia. *Jimf (Jurnal Ilmiah Manajemen Forkamma)*, 1(2), 67–86. <https://doi.org/10.32493/frkm.v1i2.2541>
- Ferawati, R. (2018). Sustainable Development Goals di Indonesia: Pengukuran dan Agenda Mewujudkannya Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Kontekstualita*, 33(02), 143–167. <https://doi.org/10.30631/kontekstualita.v35i02.512>
- Hariadi, P., Restianto, Y. E., & Bawono, R. I. (2013). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Salemba Empat: Jakarta.
- Hastuti, D. (2010). *Evaluasi Anggaran Responsif Gender*. 1–255. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/detail/17288>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (2010). *Pedoman Teknis Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Bagi Daerah*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: Jakarta.
- Khaerah, N., & Mutiarin, D. (2016). *Integrasi Anggaran Responsif Gender Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Studi Pada Anggaran Dinas Kesehatan Kota Makassar Tahun Anggaran 2014)*. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2721538>
- Liufeto, A. M., & Angi, Y. F. (2019). *ANGGARAN RESPONSIF GENDER PADA APBD PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2017-2019*. 7(2). <https://doi.org/https://doi.org/10.35508/jak.v7i2.1699>

- Mardiasmo. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Andi: Yogyakarta.
- Miles, B. M. & M. H. (1992). *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UIP: Jakarta.
- Oktaria, D. (2015). Analisis Anggaran Responsif Gender di Provinsi Sumatera Selatan. *Akuntabilitas: Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi*, 9(1), 13–26. <https://ejournal.unsri.ac.id/index.php/ja/article/view/8795>
- Sugiyono. (2006). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R&D*. CV. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Yaselin, I. M., & Chusnul, M. (2021). Analisis Anggaran Responsif Gender di Sektor Kesehatan pada APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017-2019. 1, 562–573. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2249629>
- Zaini, A., & Ningsih, S. (2018). Analisis Proses Penyusunan dan Pelaksanaan APBDes secara Akuntabel, Transparan dan Partisipatif (Studi pada Beberapa Desa di Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 3(3), 1. <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/916105>